

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pelayanan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah merupakan hal yang selalu diupayakan oleh pemerintah daerah (Mahadewi & Indraswarawati, 2023). Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya atau potensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien (Pasaribu, 2022). Untuk mencapai sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah kemudian disusun laporan pertanggungjawaban setiap periode untuk menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sahdan et al., 2024).

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan memperkuat pendapatan daerah, mengelola transfer dana, mengatur belanja daerah secara lebih efisien, serta meningkatkan tanggung jawab dalam hal pembiayaan. Kinerja keuangan daerah berhubungan dengan penilaian dan pengkajian cara pemerintah daerah mengelola serta memanfaatkan sumber daya keuangan demi mencapai sasaran pembangunan dan memberikan layanan kepada publik (Damau & Panjaitan, 2023)

Analisis pengelolaan keuangan perlu dilakukan karena merupakan pengamatan untuk menjalani kinerja keuangan di masa mendatang. Salah satu alat analisis keuangan yang dapat digunakan adalah rasio keuangan (Ichlasul Amal & Wibowo, 2022). Analisis pengelolaan keuangan dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengidentifikasi potensi atau sumber daya ekonomi, memahami situasi keuangan, mengecek kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, serta memastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengelolaan Anggaran yang baik tentunya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, dan hal ini harus dilakukan oleh seluruh pemerintah di Indonesia. seperti halnya di Jawa Tengah. Namun pada kenyataannya masih ada pemerintah daerah di Jawa Tengah yang belum mampu menjaga kinerja keuangannya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari struktur laporan keuangan Kabupaten Cilacap pada tahun 2019-2022 yang menunjukan kinerja keuangannya tidak baik-baik saja. Buruknya kinerja ini tentunya diakibatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah. Secara keseluruhan, proporsinya hanya sekitar 19,81%. Jauh berbeda dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 79,54%. Tekanan tambahan muncul akibat pertumbuhan PAD yang hanya mencapai 3,98% sebuah angka yang cukup rendah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, kontribusi transfer dari pemerintah pusat justru memperlihatkan penurunan sebesar 1,43% ini menandakan bahwa ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat mulai berkurang secara perlahan. (cilapkab.go.id, 2023)

Dengan kasus tersebut, penting untuk menggali lebih jauh tentang elemen-elemen kemandirian finansial daerah, khususnya dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan.. Rasio yang dapat digunakan kemandirian di mana karena mencerminkan kapasitas keuangan daerah dari sumber asli (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan atau transfer. Cilacap tentunya memiliki tingkat kemandirian yang rendah ini sudah menjadi pokok perhatian terhadap kinerja yang “tidak memuaskan”. Analisis lain yaitu Rasio Ketergantungan fiskal Daerah di mana rasio ini sering dibicarakan bersamaan dengan otonomi, dan sangat berkaitan dengan situasi di Cilacap (Transfer pemerintah pusat mencapai sekitar 80% dari total pendapatan). Kemudian juga dapat menggunakan rasio pertumbuhan, rasio ini memberikan ilustrasi mengenai pergeseran pendapatan sangat penting untuk memeriksa apakah

kemandirian meningkat atau menurun. Dalam berita, tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah sedikit meningkat, namun transfer mengalami penurunan, hal itu merupakan sinyal yang penting untuk analisis jangka panjang.

Seperti penelitian (Damau & Panjaitan, 2023) tentang *Analysis of Financial Performance in Kendari City Government*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan rasio kemandirian tergolong sangat rendah. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas PAD tidak efektif. Berdasarkan rasio aktivitas rata-rata pengeluaran operasional tidak berjalan dengan baik, rata-rata rasio belanja modal juga tidak berjalan baik. Berdasarkan rasio pertumbuhan dikatakan tidak berhasil. Selanjutnya ada Penelitian (Zukhri, 2020) tentang *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal* memberikan hasil berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal. Menunjukkan bahwa aspek kemandirian berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup.

Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil terdahulu, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kota di Jawa Tengah jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan fiskal, rasio pertumbuhan?

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, sebab dengan menganalisis kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana keadaan keuangan mereka dalam periode tertentu. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerjanya, sehingga pengelolaan keuangan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan lebih baik dan berdampak pada peningkatan kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah menggunakan perhitungan rasio keuangan, dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio pertumbuhan Adapun pembaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada teori yang digunakan, penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori sedangkan penelitian ini menggunakan teori agensi.

Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan daerah. Penelitian ini juga memberikan transparansi kepada publik.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) tentang teori keagenan, mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian sejumlah wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Hubungan teori keagenan dalam penelitian ini mengacu pada pemerintah daerah sebagai agen atau pengelola anggaran yang diharapkan dapat mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah adalah mengatur anggaran secara maksimal untuk mencapai sasaran yang paling tepat dan hemat, tanpa bergantung kepada transfer pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mampu menangani semua urusan pemerintahan demi kebaikan bersama.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, 2021) “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Menurut (Ramadana et al., 2023) Kinerja keuangan adalah hasil dari tindakan dan program yang dilaksanakan terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam konteks ini, kegiatan keuangan daerah merujuk pada pertumbuhan dalam sektor keuangan lokal, termasuk anggaran. Ini meliputi seluruh hak dan tanggung jawab daerah berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah, yang nilainya bisa diukur dalam uang serta segala jenis aset yang dimiliki oleh daerah itu. Oleh karena itu, kinerja keuangan daerah berkaitan dengan seberapa baik dan optimal pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk meraih sasaran mereka dalam menjalankan pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah mampu mengelola keuangannya, mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan biaya sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah (Damau & Panjaitan, 2023). Semakin besar rasio kemandirian, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan pemerintah daerah bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang bersangkutan (Soraida, 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \quad (1)$$

Berikut adalah pola interaksi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kemandirian finansial daerah.:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

<i>Kemampuan Keuangan</i>	<i>Persentase Kemandirian</i>	<i>Pola Hubungan</i>
Sangat Rendah	0% -25%	Instruktif
Rendah	25,1%-50%	Konsultatif
Sedang	50.1%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Damau & Panjaitan, 2023)

Keterangan:

1. Hubungan yang bersifat instruktif, di mana dominasi pemerintah pusat lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi lokal)
2. Hubungan yang bersifat konsultatif, di mana intervensi pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan otonomi lokal.
3. Hubungan yang bersifat partisipatif, di mana peran pemerintah pusat telah berkurang, mengingat daerah tersebut hampir sepenuhnya mampu melaksanakan urusan otonomi lokal.

4. Hubungan yang bersifat delegatif, di mana tidak ada lagi intervensi dari pemerintah pusat karena daerah sudah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi lokal. (Fathah, 2017)

Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio Tingkat Ketergantungan, yang menggambarkan rasio antara total pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan keseluruhan penerimaan daerah (Zukhri, 2020). Semakin tinggi tingkat ketergantungan fiskal daerah, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah (Saragih & Nurlinda, 2023). Rumus Ketergantungan Fiskal:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal

<i>Persentase Ketergantungan</i>	<i>Kriteria</i>
<10%	Sangat Rendah
10%-20%	Rendah
20-30%	Cukup
30-40%	Sedang
40-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: (Saragih & Nurlinda, 2023)

Rasio Pertumbuhan:

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk memahami arah peningkatan atau penurunan kinerja dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, rasio pertumbuhan menggambarkan bagaimana pendapatan berkembang dari satu periode ke periode berikutnya, apakah mengalami kenaikan pendapatan yang positif atau sebaliknya (Wulandari et al., 2023). Rumus Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan :

P_n : Total PAD pada tahun yang akan dihitung

P_0 : Total PAD tahun sebelumnya

Tabel 3. Kriteria Rasio Pertumbuhan

<i>Persentase Pertumbuhan</i>	<i>Kriteria Pertumbuhan</i>
0%-25%	Tidak Baik
26%-50%	Kurang Baik
51%-75%	Cukup Baik
76%-100%	Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Wulandari et al., 2023)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Damau & Panjaitan, 2023) tentang *Analysis of Financial Performance in Kendari city Government*, menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian tergolong sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas tergolong efektif. Rasio efisiensi tergolong tidak efisien. Rasio keserasian tergolong kurang baik. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan negatif.

Penelitian (Wulandari et al., 2023) tentang Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram menunjukkan hasil Rasio Kemandirian rendah dan termasuk pola konsultatif. Rasio Desentralisasi fiskal dikatakan sangat rendah. Rasio Efektivitas PAD dikatakan efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah berfluktuasi. Rasio Keserasian dikatakan kurang baik. Rasio pertumbuhan dikatakan tidak baik. Rasio Solvabilitas dikatakan baik.

Penelitian (Rahmadani & Rudini, 2023) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021 menunjukkan hasil Rasio Efektivitas PAD cukup efektif, kurang efektif, tidak efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah tergolong cukup efisien, kurang efisien, cukup efisien. Rasio Kemandirian terdapat pola hubungan instruktif. Rasio Keserasian masih condong pada anggaran belanja operasi daripada belanja modal. Rasio Pertumbuhan memiliki pertumbuhan yang fluktuatif

Penelitian (Zukhri, 2020) tentang Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal memberikan hasil berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal. Menunjukkan bahwa aspek kemandirian berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan daerah berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal, kemampuan berada dalam kategori sedang sampai dengan cukup.

Penelitian (Saragih & Nurlinda, 2023) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. Hasilnya menunjukkan bahwa ketergantungan yang sangat tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merujuk pada seluruh unit analisis yang memiliki karakteristik sama atau memiliki hubungan signifikan terkait isu penelitian. Populasi penelitian merujuk pada semua individu, objek, atau peristiwa yang menjadi pokok penyelidikan (Susanto et al., 2024). Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyediakan Laporan Realisasi APBD periode 2020 sampai dengan 2024.

Sampel merupakan bagian dari seluruh populasi atau representasi yang diambil untuk penelitian sebagai sumber data, yang dapat mewakili secara keseluruhan populasi (Asrulla et al., 2023). Sampel pada penelitian ini, ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel dengan sebuah pertimbangan. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah menerbitkan Laporan Realisasi APBD periode 2020-2024 di *website*.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah menerbitkan Laporan Realisasi APBD periode 2020-2024 secara berturut-turut.

Sumber Data

Sumber Data yang dipakai yakni data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan mencatat, menggandakan, membaca dan mengolah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif umumnya tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih fokus pada penjabaran kondisi, variabel, atau fenomena yang ada. Analisis menggunakan data *time series* merupakan proses yang menggunakan data yang diambil dari urutan waktu untuk menunjukkan kemajuan suatu variabel tertentu yaitu dari tahun 2020-2024. Data yang akan dievaluasi dalam pendekatan ini adalah performa keuangan daerah. Analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio pertumbuhan. Perhitungan rasio menggunakan program *Microsoft Excel*.